PENGADILAN AGAMA METRO

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068

e-mail : pametro_lampung@yahoo.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA METRO

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068

Metro - Lampung 34102

e-mail : pametro_lampung@yahoo.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Metro adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusunlaporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Metro, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

PENGADILAN AGAMA METRO

BUNYAMIN, S.Ag
NIP 19680401 199203 1 004

Pengadilan Agama Metro
Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur Metro - Lampung 34102
Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068 e-mail :
pametro_lampung@yahoo.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Metro, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

BUNYAMIN, S.Ag
NIP 19680401 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

PernyataanTanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3

II. Neraca..... 4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan..... 7

A. Profil dan Kebijakan Teknis PengadilanAgama Metro 7

B. Penjelasan atas Pos-Pos LaporanRealisasi Anggaran..... 20

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 24

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 37

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 47

F. Pengungkapan Penting Lainnya..... 51

Lampiran dan Daftar

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama MetroSemester I Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.857.685 atau mencapai 65.08 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 9.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 2.868.170.702 atau mencapai 48.40 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.926.037.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019. Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 15.377.654.348 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 33.184.250; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 15.511.063.044; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 32.000.000 dan Rp. 15.512.247.294.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 5.207.616, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 3.046.395.949 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 3.046.395.949. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 570.769 dan sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 3.040.617.564.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 15.690.554.614 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 3.040.617.564 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.862.310.244, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp. 15.512.247.294.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019		%	30 Juni 2018
		ESTIMASI / ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9.000.000	5.857.685	65,09	835.258
JUMLAH PENDAPATAN		**9.000.000**	**5.857.685**	**65,09**	**835.258**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	5.081.711.000	2.513.686.487	**49,47**	2.883.226.177
Belanja Barang	B.4	780.326.000	315.484.215	40,43	325.888.042
Belanja Modal	B.5	64.000.000	39.000.000	60,94	406.246.944
JUMLAH BELANJA		**5.926.037.000**	**2.868.170.702**	**48,40**	**3.615.361.163**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA METRO
NERACA
PER 30 Juni 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019	TA 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	32.000.000	29.500.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	1.184.250	1.934.600
Persediaan Belum Diregister	C.10	-	(2.852.000)
Jumlah Aset Lancar		33.184.250	28.582.600
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5.829.194.000	5.829.194.000
Peralatan dan Mesin	C.15	1.607.731.715	1.531.060.365
Gedung dan Bangunan	C.16	9.518.570.789	8.631.762.650
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	397.959.000	397.959.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.633.478	3.633.478
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	280.285.944
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.846.025.938)	(1.295.323.689)
Jumlah Aset Tetap		15.511.063.044	15.378.571.748
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	20.750.000	20.750.000
Aset Lain-Lain	C.22	141.212.650	113.884.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(161.962.650)	(134.634.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**15.544.247.294**	**15.407.154.348**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	32.000.000	29.500.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		32.000.000	29.500.000
JUMLAH KEWAJIBAN		32.000.000	29.500.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	15.512.247.294	15.377.654.348
JUMLAH EKUITAS		15.512.247.294	15.377.654.348
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**15.544.247.294**	**15.407.154.348**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.207.616	835.258
JUMLAH PENDAPATAN			**5.207.616**	**835.258**
BEBAN				
	Beban Pegawai	D.2	2.506.334.196	2.882.284.555
	Beban Persediaan	D.3	9.385.950	21.812.600
	Beban Barang dan Jasa	D.4	196.691.966	163.289.261
	Beban Pemeliharaan	D.5	73.830.185	105.819.594
	Beban Perjalanan Dinas	D.6	22.890.000	31.200.000
	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		-
	Beban Bantuan Sosial	D.8		-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	237.263.652	220.721.290
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		-
JUMLAH BEBAN			**3.046.395.949**	**3.425.127.300**
	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(3.041.188.333)**	**(3.424.292.042)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL		D.11		
	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		650.000	-
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
	Defisit Selisih Kurs		-	-
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		677.167	498.200
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		756.398	1.045.000
	SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		570.769	(546.800)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(3.040.617.564)**	**(3.424.838.842)**
POS LUAR BIASA		D.12		
	Pendapatan PNBP		-	-
	Beban Perjalanan Dinas		-	-
	Beban Persediaan		-	-
	SURPLUS/DEFISIT LO		**(3.040.617.564)**	**(3.424.838.842)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2019	31 Juni 2018
EKUITAS AWAL	E.1	15.690.554.614	15.187.967.285
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.040.617.564)	(3.424.838.842)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.862.310.244	3.614.525.905
EKUITAS AKHIR	E.5	**15.512.247.294**	**15.377.654.348**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Visi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Agama Metro sebagai berikut:

Misi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatnya kualitas pimpinan badan peradilan.
4. Meningkatnya kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Metromenetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agamma Metro.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Lalu dari tujuan strategis di atas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 30 Juni 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Metro. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulaidari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasikeuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BasisAkuntansi

Kantor Pengadilan Agama Metro menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis

kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporankeuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Metro dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 30 Juni 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp. 5.857.685

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 5.857.685 atau mencapai 65.08 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.9.000.000. Pendapatan Pengadilan Agama Metro terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya	-	650.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan bangunan	9.000.000	5.207.616	57,86
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang lalu		69	-
Jumlah	**9.000.000**	**5.857.685**	**65,09**

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2019 mengalami penaikan sebesar 601,30 % dibandingkan per 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena menaiknya Jumlah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan ada Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2019 dan per 30 Juni 2018

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2019	REALISASI 30 JUNI 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	5.857.685	835.258	601,30
Jumlah	**5.857.685**	**835.258**	**601,30**

Realisasi Belanja Negara Rp. 2.868.170.702

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara pada per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 2.868.170.702 atau 48,40 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.926.037.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
30 Juni 2019

Uraian	30 Juni 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.081.711.000	2.513.686.487	49,47
Belanja Barang	780.326.000	315.484.215	40,43
Belanja Modal	64.000.000	39.000.000	60,94
Total Belanja Kotor	**5.926.037.000**	**2.868.170.702**	**48,40**
Pengembalian	-	(2.773)	-
Jumlah	**5.926.037.000**	**2.868.167.929**	**48,40**

Dibandingkan dengan realisasi belanja 30 Juni 2018, Realisasi Belanja 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 20,67% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya jumlah pegawai Pengadilan Agama Metro, dan
2. Menurunnya jumlah Pagu Anggaran Belanja Modal;

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	2.513.686.487	2.883.226.495	(12,82)
Belanja Barang	315.484.215	325.888.042	(3,19)
Belanja Modal	39.000.000	406.246.944	(90,40)
Jumlah	**2.868.170.702**	**3.615.361.481**	**(20,67)**

Belanja Pegawai Rp. 2.513.686.487

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2.513.686.487 dan Rp.2.883.226.177. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNSsebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 12,82 % dari 30 Juni 2018.

Perbandingan Belanja Pegawai
30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.018.369.160	1.126.236.200	(9,58)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.689	17.095	(14,07)
Belanja Tunj. Suami Istri PNS	68.702.122	79.224.050	(13,28)
Belanja Tunj. Anak PNS	24.316.286	24.364.156	(0,20)
Belanja Tunj. Struktural PNS	16.380.000	20.160.000	(18,75)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.065.170.000	1.249.910.000	(14,78)
Belanja Tunj. PPh PNS	140.791.250	160.432.974	(12,24)
Belanja Tunj. Beras PNS	48.448.980	56.560.020	(14,34)
Belanja Uang Makan PNS	125.204.000	157.832.000	(20,67)
Belanja Tunj Umum PNS	6.290.000	8.490.000	(25,91)
Belanja Uang Lembur PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**2.513.686.487**	**2.883.226.495**	**(12,82)**
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.773)	(318)	772,01
Jumlah Belanja	**2.513.683.714**	**2.883.226.177**	**(12,82)**

Belanja Barang Rp. 315.484.215

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 315.484.215 dan Rp. 325.888.042. Realisasi belanja barang 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 3,19% dari realisasi

belanja barang 30 Juni 2018.

Perbandingan Belanja Barang

Per 30 Juni 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2019	REALISASI 30 JUNI 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	160.843.242	127.173.593	26,48
Belanja Barang Non Operasional	2.090.000	2.472.200	(15,46)
Belanja Barang Persediaan	20.439.000	36.820.250	(44,49)
Belanja Jasa	47.622.288	38.060.655	25,12
Belanja Pemeliharaan	63.689.685	90.161.344	(29,36)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.800.000	31.200.000	(33,33)
Jumlah Belanja Kotor	**315.484.215**	**325.888.042**	**(3,19)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**315.484.215**	**325.888.042**	**(3,19)**

Belanja Modal

Rp. 39.000.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 39.000.000 dan Rp. 406.246.944 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 90,40% dibandingkan 30 Juni 2018 disebabkan oleh turunnya jumlah pagu anggaran belanja modal pada tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000	125.961.000	(69,04)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	280.285.944	(100,00)
Belanja Modal Lainnya (anti Virus)	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**39.000.000**	**406.246.944**	**-90,40**
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	**39.000.000**	**406.246.944**	**-90,40**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 32.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.32.000.000 dan Rp.29.500.000 . yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaranadalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Keterangan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Uang Tunai	32.000.000	29.500.000
BRI Cabang Metro A/C 00000130.01.000084.30.8	-	-
Jumlah	**32.000.000**	**29.500.000**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai rekening Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Keterangan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Uang Tunai	-	-
Uang di Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Keterangan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang PNBP Rp. 0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp. 0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar TPA Rp. 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp. 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka Rp. 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.250.860. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka
30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Jenis	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Persekot/ Uang muka gaji	-	250.860
Jumlah	**-**	**250.860**

Persediaan Rp.1.184.250

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.1.184.250 dan Rp.1.944.600 .

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Jenis	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Barang Konsumsi	879.750	1.884.600
Barang untuk Pemeliharaan	304.500	60.000
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	**1.184.250**	**1.944.600**

Persediaan Belum Diregister Rp. 0

C.10 Persediaan Belum Diregister

Nilai Persediaan Belum Diregister per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Persediaan Belum Diregister dengan nilai minus muncul dikarenakan barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional kantor telah dibeli akan tetapi pembelian tersebut belum diajukan (GU) ke KPPN.Rincian Persediaan Belum Diregister per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Persediaan Belum Diregister	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Tagihan TP/TGR Rp. 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp. 0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp. 5.829.194.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Metro per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.5.829.194.000 dan Rp. 5.829.194.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**5.829.194.000**
Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2019	**5.829.194.000**

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 30 Juni 2019

No	Luas	Peruntukan	Nilai
1	355 m2	Rumah Dinas PA Metro	494.831.000
2	5315 m2	Gedung Kantor PA Metro	5.334.363.000
Jumlah			5.829.194.000

Peralatan dan Mesin Rp. 1.607.731.715

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah Rp.1.607.731.715 dan Rp. 1.568.731.715. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**1.568.731.715**
Mutasi tambah :	39.000.000
- Pembelian	39.000.000
Mutasi kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2019	**1.607.731.715**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	-1.175.648.986
Nilai Buku per 30 Juni 2019	**432.082.729**

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp. 9.518.570.789

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah Rp. 9.518.570.789 dan Rp. 9.518.570.789 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**9.518.570.789**
Mutasi tambah :	**0**
Mutasi kurang :	**0**
Saldo per 30 Juni 2019	**9.518.570.789**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	(501.980.856)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	**9.016.589.933**

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp. 397.959.000

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 397.959.000 dan Rp. 397.959.000.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**397.959.000**
Mutasi tambah:	**0**
Mutasi kurang:	**0**
Saldo per 30 Juni 2019	**397.959.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	(168.396.096)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	**229.562.904**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp. 3.633.478

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah Rp. 3.633.478 dan Rp. 3.633.478.Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**3.633.478**
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2019	**3.633.478**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
Nilai Buku per 30 Juni 2019	**3.633.478**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 1.846.025.938

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing Rp. 1.846.025.938 dan Rp.1.608.762.286

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

30 Juni 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.607.731.715	1.175.648.986	432.082.729
2	Gedung dan Bangunan	9.518.570.789	501.980.856	9.016.589.933
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	397.959.000	168.396.096	229.562.904
4	Aset Tetap Lainnya	3.633.478	0	3.633.478
Jumlah		**11.527.894.982**	**1.846.025.938**	**9.681.869.044**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp. 20.750.000

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah Rp. 20.750.000 dan Rp. 20.750.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Metro berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 desember 2018	**20.750.000**
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2019	**20.750.000**
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2019	(20.750.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	**0**

Aset Lain-Lain Rp. 141.212.650

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah Rp. 141.212.650 dan Rp. 141.212.650.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	**141.212.650**
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2019	**141.212.650**
Akumulasi Penyusutan	(141.212.650)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	**0**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. (161.962.650)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing Rp. (161.962.650) dan Rp. (161.962.650)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni

2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	20.750.000	20.750.000	0
Jumlah	**20.750.000**	**20.750.000**	**0**
Aset Lain-lain	141.212.650	141.212.650	0
Jumlah	**161.962.650**	**161.962.650**	**0**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp.32.000.000

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp. 32.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 19.123.082. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka
Rp. 0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Ekuitas
Rp. 15.512.247.294

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.512.247.294 dan Rp. 15.690.554.614. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp. 5.207.616

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untukperiode yang berakhirpada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 5.207.616 dan Rp. 835.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.207.616	584.398	791,11
Persekot / Uang Muka Gaji	-	250.860	(100,00)
Jumlah	**5.207.616**	**835.258**	**523,47**

Beban Pegawai Rp. 2.506.334.196

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.506.334.196 dan Rp. 2.882.284.873.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.017.812.660	1.125.410.600	(9,56)
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.689	16.657	(11,81)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(2.773)	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68.646.472	79.141.490	(13,26)
Beban Tunj. Anak PNS	24.294.026	24.331.132	(0,15)
Beban Tunj. Struktural PNS	16.380.000	20.160.000	(18,75)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.061.570.000	1.249.910.000	(15,07)
Beban Tunj. PPh PNS	140.156.142	160.432.974	(12,64)
Beban Tunj. Beras PNS	48.448.980	56.560.020	(14,34)
Beban Uang Makan PNS	122.724.000	157.832.000	(22,24)
Beban Tunjangan Umum PNS	6.290.000	8.490.000	(25,91)
Beban Uang Lembur	0	0	-
Jumlah	**2.506.334.196**	**2.882.284.873**	**(13,04)**

Beban Persediaan Rp. 9.385.950

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.385.950 dan Rp. 21.812.600. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	9.385.950	21.812.600	-56,97
Jumlah	**9.385.950**	**21.812.600**	**-56,97**

Beban Barang dan Jasa Rp. 196.691.966

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.

196.691.966 dan Rp. 163.289.261. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya beban barang operasional lainnya sampai dengan bulan Juni 2019.

Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	126.223.186	109.025.093	15,77
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas	114.000	516.500	(77,93)
Beban honor operasional satker	18.750.000	16.250.000	15,38
Beban barang operasional lainnya	14.342.000	-	#DIV/0!
Beban bahan	-	472.200	(100,00)
Beban barang non operasional lainnya	-	2.000.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	34.884.157	30.854.398	13,06
Beban Langganan Telepon	2.378.623	4.171.070	(42,97)
Jumlah	**196.691.966**	**163.289.261**	**20,46**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp. 73.830.185

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 73.830.185 dan Rp.105.819.594. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. penurunan beban pemeliharaan karena berkurangnya jumlah pagu anggaran yang digunakan untuk renovasi gedung kantor dan rumah dinas. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.955.500	48.203.500	(37,86)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.734.185	41.957.844	(19,60)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	10.140.500	15.658.250	(35,24)
Jumlah	**73.830.185**	**105.819.594**	**(30,23)**

Beban Perjalanan Dinas Rp. 22.890.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.890.000 dan Rp. 31.200.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh turunnya jumlah Undangan dan konsultasi yang dibebankan pada DIPA kantor.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	20.800.000	27.750.000	(25,05)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.090.000	3.450.000	(39,42)
Jumlah	**22.890.000**	**31.200.000**	**(26,63)**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing

Rp. 0

sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai beban untuk diserahkan pada masyarakat.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	**0**	**0**	-

Beban Bantuan Sosial Rp. 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena tidak ada pagu anggaran untuk beban bantuan sosial.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30

Rp. 237.263.652

Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 237.263.652 dan Rp. 220.721.290 .

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	91.890.532	84.480.533	8,77
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	104.139.246	95.006.883	9,61
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	39.829.125	39.829.125	-
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	1.404.749	1.404.749	
Jumlah Penyusutan	**237.263.652**	220.721.290	7,49

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah	**0**	**0**	-

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 570.769

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional periode per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 570.769 dan Rp. (546.800). Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Periode per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN)
Pendapatan dari pelepasan Aset Non Lancar	650.000	0	#DIV/0!
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	677.167	498.200	35,92
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-756.398	-1.045.000	(27,62)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**570.769**	**-546.800**	(204,38)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Pos Luar Biasa Rp. 0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untukperiode per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Pos Luar Biasa sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2019 dan 2017

URAIAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. 15.690.554.614

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.690.554.614 dan Rp. 15.690.554.614.

Defisit LO Rp. (3.040.617.564)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. (3.040.617.564) dan Rp. (7.199.832.104) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp. 0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. (117.292.569). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2019

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	**0**

Koreksi Lain-Lain Rp. 0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas

pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Jumlah	**0**

Transaksi Antar Entitas Rp. 2.862.310.244

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.862.310.244 dan Rp. 7.819.712.002. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.868.167.929
Diterima Dari Entitas Lain	(5.857.685)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	**2.862.310.244**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas lain (Rp. 5.857.685) dan Ditagihkan ke Entitas lain Rp. 2.868.167.929.

E.4.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar (Rp. 5.857.685) sedangkan DKEL sebesar Rp. 2.868.167.929.

Transfer masuk

Rp. 0 dan

Transfer Keluar Rp. 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	0	0
2	Persediaan	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Hibah Langsung Rp. 0

Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Rp. 0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp. 0.

Ekuitas Akhir Rp. 15.512.247.294

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.512.247.294 dan Rp. 15.377.001.348.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian yang penting apapun setelah tanggal neraca di satuan Kerja Pengadilan Agama Metro untuk periode per 30 Juni 2019 yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN :

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut BPK pada periode 30 Juni 2019.

F.2.2 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro adalah:

- BRI CABANG METRO A/C 00000130.01.000084.30.8 an. BPg 126 PA Metro 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA MARI dengan saldo per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0.

F.2.3 Revisi DIPA

Pada Periode yang berakhir 30 Juni 2019 Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro terdapat revisi DIPA sebagai berikut :

1. Revisi ke-1, tanggal 29 Maret 2019 terdapat pergantian Nama PPSPM dari an. ABDUL WAHID AZIZ, S.Kom menjadi MEDI EFENDI, S.Pd., M.H. serta adanya

perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019

2. Revisi ke-2, tanggal 29 Mei 2019 terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Juli sampai dengan Desember 2019 dan terdapat perubahan nilai pada Belanja Barang dari Rp. 683.726.000,- menjadi Rp. 780.326.000,- dan terdapat perubahan nilai pada Belanja Modal dari Rp. 39.000.000,- menjadi Rp. 64.000.000,-
3. Revisi ke-3, tanggal 26 Juni 2019 terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan April sampai dengan Desember 2019

F. 2.4Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat mengenai SPM, SP2D, SSBP dan SSPB Pada Periode yang berakhir 30 Juni 2019 di Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

- Tidak terdapat catatan penting pada kantor Pengadilan Agama Metro untuk periode 30 Juni 2019 yang dapat diungkapkan pada Laporan keuangan ini.

PENGADILAN AGAMA METRO
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 30 Juni 2019	Beban Peny. Per 30 Juni 2019	Akm. Peny. Per 30 Juni 2019	Nilai Buku Per 30 Juni 2019
A	**Peralatan dan Mesin**						
1	Alat Bantu	2	17.661.100	16.438.879	1.222.221	17.661.100	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	2	182.164.117	182.164.117	-	182.164.117	-
3	Alat Kantor	23	100.424.401	78.024.845	3.663.890	81.688.735	**18.735.666**
4	Alat Rumah Tangga	225	704.503.097	403.396.847	46.263.550	449.660.397	**254.842.700**
5	Alat Komunikasi	15	26.010.000	23.370.000	440.000	23.810.000	**2.200.000**
7	Alat Kedokteran	1	990.000	198.000	99.000	297.000	**693.000**
8	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2	21.340.000	2.845.336	711.334	3.556.670	**17.783.330**
9	Alat Khusus Kepolisian	1	5.500.000	2.750.000	687.500	3.437.500	**2.062.500**
10	Komputer Unit	33	458.547.000	297.048.430	33.808.036	330.856.466	**127.690.534**
11	Peralatan Komputer	15	90.560.000	77.490.000	4.995.001	82.485.001	**8.074.999**
12	Peralatan Olahraga	1	32.000	32.000	-	32.000	-
	Jumlah		**1.607.731.715**	**1.083.758.454**	**91.890.532**	**1.175.648.986**	**432.082.729**
B	**Gedung dan Bangunan**						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10	8.320.882.789	341.606.063	85.394.064	427.000.127	**7.893.882.662**
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	707.951.000	36.033.054	12.011.018	48.044.072	**659.906.928**
3	Tugu/Tanda Batas	3	489.737.000	20.202.493	6.734.164	26.936.657	**462.800.343**
	Jumlah		**9.518.570.789**	**397.841.610**	**104.139.246**	**501.980.856**	**9.016.589.933**
C	**Jalan dan Jembatan**						
1	Jalan	1	318.633.000	119.487.375	39.829.125	159.316.500	**159.316.500**
	Jumlah		**318.633.000**	**119.487.375**	**39.829.125**	**159.316.500**	**159.316.500**
D	**Irigasi**						
1	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2	44.720.000	2.916.522	972.174	3.888.696	**40.831.304**
	Jumlah		**44.720.000**	**2.916.522**	**972.174**	**3.888.696**	**40.831.304**
E	**Jaringan**						
1	Jaringan Listrik	1	34.606.000	4.758.325	432.575	5.190.900	**29.415.100**
	Jumlah		**34.606.000**	**4.758.325**	**432.575**	**5.190.900**	**29.415.100**
F	**Aset Tetap Yang Tidak Digunakan**						
1	Alat Kantor	90	36.243.650	36.243.650	-	36.243.650	-
2	Alat Rumah Tangga	72	16.846.000	16.846.000	-	16.846.000	-
3	Alat Komunikasi	2	52.000	52.000	-	52.000	-
4	Komputer Unit	9	87.121.000	87.121.000	-	87.121.000	-
5	Peralatan Komputer	1	950.000	950.000	-	950.000	-
	Jumlah		**141.212.650**	**141.212.650**	**0**	**141.212.650**	**0**
	Total		**11.665.474.154**	**1.749.974.936**	**237.263.652**	**1.987.238.588**	**9.678.235.566**

* Beban Amortisasi